

ANALISIS PRASANGKA DAN DISKRIMINASI PADA ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA

***Muslim Hidayat¹, Megantara putra², Muhammad Rizki Saputro³,
Rahmawati Nuril Husna⁴.**

¹*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia*
Email: muslim.hidayat@uin-suka.ac.id

²*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia*
Email: 20107010039@student.uin-suka.ac.id

³*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia*
Email: 20107010045@student.uin-suka.ac.id

⁴*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia*
Email: 20107010071@student.uin-suka.ac.id

Abstract

Ethnic diversity becomes an advantage for Indonesia, both from the island, race, ethnicity, language, and so on. This diversity can be a selling point in its own international arena. But on the other hand, it also has a negative side. One of the downsides is that it tends to be easy to arise prejudice and discrimination. Prejudice and discrimination itself occur in several groups, one of which is ethnic Chinese. Whereas Indonesia has the motto "Bhineka Tunggal Ika" which means although different but still in one unit. But in reality in a different society, where there are still things that are contrary to the motto. Based on this, the author conducted this study. Therefore, this study aims to find out the source of prejudice, aspects of prejudice, ethnic Chinese discrimination, and how to deal with the problem of prejudice and discrimination in ethnic Chinese in Indonesia. The methods used in this research are literature studies with library research, as well as sources used in the form of journals and documents relevant to the study in this study. From the sources obtained, analysis related to the purpose of the research is carried out. The results of this study are known to have several sources that cause prejudice in ethnic Chinese, aspects of prejudice, forms of discrimination that occur in ethnic Chinese, so that a way to overcome this can be proposed.

Keywords: Discrimination, Ethnic Chinese, Prejudice.

Abstrak

Keberagaman etnis menjadi suatu keuntungan bagi Indonesia, baik dari pulau, ras, etnis, bahasa, dan lain sebagainya. Keberagaman tersebut mampu menjadi suatu nilai jual tersendiri di kancah internasional. Namun di sisi lain hal tersebut juga memiliki sisi negatif. Salah satu sisi negatifnya adalah cenderung mudah timbul prasangka dan diskriminasi. Prasangka dan diskriminasi ini sendiri terjadi pada beberapa kelompok salah satunya pada etnis Tionghoa. Padahal Indonesia memiliki semboyan “*Bhineka Tunggal Ika*” yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap dalam satu kesatuan. Namun pada kenyataannya di masyarakat berbeda, di mana masih terdapat hal-hal yang bertolak belakang dengan semboyan tersebut. Berlandaskan pada hal tersebutlah penulis melakukan penelitian ini. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumber prasangka, aspek-aspek prasangka, diskriminasi etnis Tionghoa, dan cara menangani permasalahan prasangka dan diskriminasi pada etnis Tionghoa di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan kajian kepustakaan (*library research*), serta sumber yang digunakan berupa jurnal dan dokumen-dokumen yang relevan dengan kajian dalam penelitian ini. Dari sumber yang didapat maka dilakukan analisis yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah diketahui terdapat beberapa sumber yang menyebabkan terjadinya prasangka pada etnis Tionghoa, aspek-aspek dalam prasangka, bentuk diskriminasi yang terjadi pada etnis Tionghoa, sehingga dapat diajukan suatu cara mengatasi hal tersebut.

Kata Kunci: Diskriminasi, Etnis Tionghoa, Prasangka.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara berbentuk kepulauan yang penuh keanekaragaman akan budaya, ras, suku bangsa (etnis), kepercayaan, agama, dan masih banyak keragaman lainnya. Indonesia tercatat memiliki 17.504 pulau besar dan kecil, dimana sekitar 6000 diantaranya tidak berpenghuni dan 4.444 yang menyebar di seluruh penjuru khatulistiwa. Selain memiliki bentang alam yang mendukung keanekaragaman, dan memiliki populasi padat dan luas, Indonesia memiliki sekitar 300 kelompok etnis (suku bangsa) (Antara & Yogantari, 2018). Keragaman itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu hal yang berbeda jenis atau beragam-ragam, selain itu dapat juga diartikan sebagai satu kesatuan hati, rukun sehingga keragaman berarti kerukunan.

Definisi dari etnis atau suku menurut Koentjaraningrat adalah “suatu kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan yang lain berdasarkan akar dan identitas kebudayaan. Dengan kata lain etnis ialah kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas tadi seringkali dikuatkan oleh kesatuan” (Hendro, 2013). Menurut John W. Santrock, etnis adalah budaya, karakteristik kewarganegaraan, ras, agama dan bahasa

(dalam Ali et al., 2010). Kemudian etnis dapat juga ditentukan oleh adanya kesadaran kelompok, pengakuan akan kesatuan kebudayaan dan juga persamaan asal-usul. Koentjaraningrat (dalam Hendro, 2013) juga menjelaskan etnis dapat ditentukan berdasarkan persamaan asal-usul (faktor yang dapat menimbulkan suatu ikatan). Sehingga dapat disimpulkan etnis atau suku bangsa merupakan suatu kesatuan sosial yang dapat memberikan perbedaan individu maupun kelompok dalam satu kesatuan berdasarkan persamaan asal-usul seseorang sehingga dapat dikategorikan dalam status kelompok mana ia dimasukkan. Istilah etnis ini digunakan untuk mengacu pada satu kelompok, atau kategori sosial yang perbedaannya terletak pada kriteria kebudayaan. Dimana setiap etnis telah memiliki warisan budaya sendiri, kemudian adat istiadat yang dipengaruhi oleh kebudayaan India, Arab, Tiongkok, Eropa, dan Melayu. Kemudian setiap etnis juga membawa kebiasaan-kebiasaan tersendiri yang merupakan proses belajar masing-masing individu dalam kelompok etnisnya.

Keberadaan masyarakat Indonesia yang majemuk, memiliki banyak keberagaman suku budaya, ras serta etnik, dan adat istiadat berbudaya. Maka Hal ini perlu ditinjau lebih lanjut dikarenakan banyaknya persoalan perihal kebudayaan yang sangat kompleks, sebagai suatu fenomena serta kekayaan dari bangsa. Van de Berghe (dalam Ridwan, 2015) menjelaskan bahwa masyarakat majemuk atau warga yang beragam selalu memiliki sifat-sifat dasar menjadi berikut: a. Terjadinya segmentasi kedalam kelompok-kelompok yang tak jarang mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda; b. Memiliki struktur sosial yang terbagi dalam lembaga yang bersifat nonkomplementer; c. Kurang mengembangkan mufakat diantara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat fundamental; d. Secara relatif, tidak jarang terjadi permasalahan diantara kelompok yang satu dengan yang lainnya; e. Integrasi sosial tumbuh pada atas paksaan dan saling ketergantungan di pada bidang ekonomi; f. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok yang lain.

Berdasarkan uraian di atas, keragaman masyarakat berpotensi mengakibatkan segmentasi kelompok struktural yang terbagi-bagi, sering terjadi pertarungan, integrasi yg dipaksakan, sikap *chauvinisme* yang menganggap bahwa suku bangsanya (etnisnya) lebih baik dari suku lain. Sehingga sering menimbulkan prasangka dan diskriminasi diantara kelompok yang dominan dan yang minoritas. Tentu saja potensi demikian adalah potensi yang melemahkan motilitas kehidupan warga.

Etnis Tionghoa pertama kali datang ke kepulauan nusantara yang termasuk wilayah Indonesia, dimulai pada abad ke 7 Masehi. Mereka umumnya adalah pedagang dan pelaut yang menjalani perdagangan rempah-rempah dan barang lainnya. Hingga sekarang mengalami pasang surut terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap etnis ini. Termasuk salah satunya pengekangan di masa Orde baru dan puncaknya terjadi pada tragedi Mei 1998 (Ibrahim, 2013).

Sebagai contohnya konflik yang dialami oleh rakyat Indonesia keturunan etnis Tionghoa pada Mei 1998 dimana terjadi insiden yang mengakibatkan ratusan warga keturunan etnis Tionghoa meninggalkan Jakarta. Sebagai alasannya pada pemerintahan

orde baru pada waktu itu untuk menjaga stabilitas serta keamanan bangsa. Pada pemerintahan tersebut terlihat efektif selama 32 tahun, namun realitanya bersifat "semu" yang mengakibatkan stabilitas tatanan yang melanggengkan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Orde Baru sepertinya menerapkan standarisasi ganda dalam problem ini dengan menekan kelompok tertentu dengan dalih menyelesaikan konflik antar kelompok (Ibrahim, 2013). Teori *realistic conflict theory* memandang bahwa kompetisi sejumlah kelompok sosial memunculkan peluang timbulnya konflik sosial diantara masing-masing kelompok (Taum, 2006). Bila kompetisi berlanjut, maka masing-masing anggota akan memandang anggota kelompok yang lain menjadi musuh. Jika ada isyarat agresi, maka perilaku agresi akan ada. Konflik tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara dua etnis tidak sama serta laju pembangunan bangsa memberikan porsi yg tidak seimbang. Stereotip, prasangka, serta diskriminasi acapkali mengawali kebencian serta kerusuhan rasial. Hal ini bisa terjadi Bila etnis-etnis tersebut menetap pada suatu wilayah yang didalamnya dihuni etnis secara umum dikuasai (mayoritas dan minoritas).

Pandangan stereotip pada etnis Tionghoa, baik secara sosio-historis, budaya, ekonomi, dan politik, berhasil memproduksi dan mereproduksi mitos-mitos yang membuat substansi permasalahannya semakin sulit disentuh (Juditha, 2015). Pada satu sisi pengembangan keragaman budaya, kepercayaan, dan seluruh yang tergolong pada SARA menjadi bagian dari kebijakan pemerintah. tetapi pada sisi lain justru keragaman itu seringkali dicurigai sebagai salah satu alat politik untuk meraih kekuasaan namun dampaknya dapat mengancam stabilitas nasional (Hanggara, 2018).

Prasangka atau *prejudice* berasal dari kata latin *prejudicium*, yang berarti suatu penilaian yang sesuai dengan keputusan dan pengalaman terdahulu. Pada dasarnya prasangka ialah cara pandang seseorang terhadap orang lain namun secara negatif. Sehingga prasangka berpotensi menimbulkan kesalahpahaman ketimbang satu pemahaman dalam berkomunikasi (Sihabudin & Amiruddin, 2008).

Menurut Chaplin (2014), Prasangka atau *prejudice* merupakan suatu sikap, baik positif maupun negatif, yang mana telah dirumuskan sebelumnya agar bias memberikan cukup bukti dan dipertahankan dengan kegigihan emosional. Prasangka juga dapat diartikan sebagai satu kepercayaan atau pendapat negatif yang mempengaruhi individu untuk bertingkah laku atau berpikir dengan cara tertentu mengenai orang lain.

Prasangka merupakan salah satu bentuk sikap negatif kepada suatu kelompok lain atau orang tertentu. Prasangka juga berarti membuat keputusan sebelum mengetahui fakta yang relevan mengenai objek tertentu. Prasangka tersebut dapat muncul karena adanya penilaian yang tidak berdasar dan kurang cermat sehingga terjadi penyimpangan pandangan (bias) dari hal yang sebenarnya (Nisa, 2021). Dalam psikologi sosial, prasangka sosial diartikan sebagai sikap atau perasaan seseorang kepada individu tertentu, golongan ras, atau kebudayaan yang berlainan dengan kelompoknya. Nisa (2021) mengemukakan pendapat bahwa prasangka sosial ialah perasaan atau sikap individu terhadap golongan lain yang berbeda ras maupun kebudayaannya. Menurut Arifin (2015) prasangka sosial ialah sikap negatif yang

diperlihatkan individu atau suatu kelompok tertentu terhadap individu atau kelompok lainnya. Baron & Byrne (dalam Juditha, 2015), berpendapat bahwa prasangka merupakan sebuah sikap (biasanya negatif) terhadap anggota kelompok tertentu, karena mereka menjadi anggota dalam kelompok tersebut.

Dari definisi mengenai prasangka yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa prasangka merupakan suatu perasaan negatif individu atau kelompok terhadap individu maupun kelompok lain. Kemudian, menurut Chaplin (2014) diskriminasi atau *discrimination* adalah proses membedakan antara dua objek, proses untuk membedakan diantara dua stimuli. Fulthoni et al., (2009) menyatakan bahwa diskriminasi merupakan pembedaan perlakuan. Dimana perbedaan perlakuan tersebut bisa disebabkan karena warna kulit, golongan atau suku dan dapat pula karena perbedaan gender, ekonomi, agama dan lain sebagainya. Theodorson & Theodorson (dalam Fulthoni et al., 2009) berpendapat bahwa diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang atau tidak sepadan terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Pendapat tersebut biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan kelompok mayoritas yang dominan dalam berhubungan dengan kelompok minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut tidak bermoral dan tidak demokratis.

Kemudian, Brigham (dalam Kuncoro, 2021) berpendapat bahwa diskriminasi merupakan perlakuan yang diberikan secara berbeda karena keanggotaannya dalam suatu kelompok atau etnik tertentu. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa diskriminasi adalah suatu tindakan yang tidak sama rata atau berbeda yang ditujukan kepada suatu kelompok atau individu tertentu. Yang mana perlakuan berbeda tersebut dikarenakan oleh suku, ras, agama, warna kulit, gender, ekonomi dan lain sebagainya. Terdapat beberapa dampak yang disebabkan oleh adanya prasangka dan diskriminasi pada etnis Tionghoa. Menurut Korstchak (dalam Burhan & Sani, 2013), menyatakan bahwa Di beberapa tempat di Indonesia, etnis Tionghoa masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan dokumen registrasi nasional seperti akte lahir, kartu tanda penduduk, dan surat pernikahan (Ibrahim, 2013). Di bidang pendidikan, banyak dari mereka juga enggan bersekolah di sekolah negeri karena takut akan prasangka dan diskriminasi yang mungkin mereka alami (Marista, 2014).

Selain itu, etnis Tionghoa juga sering menjadi korban kekerasan dan tindak kriminal. Dampak negatif lainnya dari prasangka dan diskriminasi ini adalah konflik budaya, agama, dan bahasa yang terjadi di Indonesia, contohnya antara etnis Tionghoa dan Bugis Makassar. Penyebab utama masalah ini adalah stereotip dan prasangka yang kuat antara kedua etnis tersebut. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang kesadaran multikulturalisme melalui sosialisasi yang berkelanjutan kepada semua etnis yang hidup berdampingan, termasuk etnis Tionghoa (Burhan & Sani, 2013), Bugis Makassar, dan etnis-etnis lainnya. Hal ini penting karena tanpa kesadaran multikulturalisme, bangsa ini akan kesulitan membangun kemajuan di tengah keragaman yang ada. (Juditha, 2015). Dengan adanya

prasangka dan diskriminasi, tentu terdapat faktor-faktor penyebabnya. Menurut Baron dan Byrne (dalam Hanurawan, 2010), Ada empat faktor utama yang menjadi penyebab timbulnya prasangka sosial, yaitu konflik langsung antar kelompok, pengalaman pembelajaran pada masa awal, kategori sosial, dan berbagai aspek dalam kognisi sosial. Prasangka sosial dapat muncul ketika terdapat persaingan dalam memperebutkan kekuasaan atau sumber daya. Hal ini sesuai dengan teori Konflik Kelompok Realistik (*Realistic Group Conflict Theory*) yang menjelaskan bahwa prasangka muncul karena kelompok-kelompok bersaing untuk menguasai sumber daya yang terbatas.

Pengalaman pembelajaran pada masa perkembangan awal seseorang dapat membentuk prasangka, karena lingkungan atau kelompok sosialnya dapat memengaruhi pembentukan prasangka tersebut. Teori belajar sosial menjelaskan bahwa individu akan belajar prasangka melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya, terutama dalam konteks pembelajaran sosial (Lange et al., 2012). Menurut teori ini, prasangka sosial merupakan sesuatu yang dipelajari sama halnya belajar nilai-nilai sosial yang lain.

Pada kategori sosial, seseorang akan cenderung menyederhanakan lingkungannya dengan membuat kategori, yaitu dengan cara mengklasifikasikan objek atau manusia ke dalam kelompok-kelompok. Hal ini dijelaskan dalam teori kategorisasi sosial yang mengemukakan bahwa individu membagi dunia sosialnya menjadi dua kategori ekstrim yang saling terpisah.

Faktor kognisi sosial. Prasangka juga dapat tumbuh berdasarkan cara individu berpikir tentang individu lain. Salah satu fenomena dalam kognisi sosial yang berkontribusi terhadap perkembangan prasangka adalah "korelasi ilusif," yang mengacu pada kecenderungan untuk melihat keseragaman dalam kelompok luar (kelompok lain). Fenomena ini sering disebut sebagai "efek homogenitas kelompok luar" (*outgroup homogeneity effect*). Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumber prasangka, aspek-aspek prasangka, diskriminasi etnis Tionghoa, dan cara menangani permasalahan prasangka dan diskriminasi pada etnis Tionghoa di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur. Metode studi literatur adalah salah satu metode penelitian dengan mengumpulkan data pustaka, membaca, dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, seperti buku, artikel, dan jurnal-jurnal yang terkait. Metode studi literatur atau studi kepustakaan dapat membuat peneliti memiliki pendalaman materi yang lebih luas mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian (Zed, 2014). Lebih lanjut melalui metode ini peneliti mencoba mengambil secara sistematis mereview baik dari jurnal maupun buku yang sudah pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya sebagai bahan dasar untuk menganalisisnya.

B. Sumber Prasangka

Prasangka sebagai sikap memiliki berbagai sumber yang berkontribusi padanya. Prasangka terhadap etnis Tionghoa tidak hanya berasal dari satu atau dua faktor, melainkan ada beberapa faktor yang dapat menjadi pemicu munculnya prasangka

tersebut. Menurut Sarwono (seperti yang dikutip dalam Ulaan dkk, 2016), prasangka dapat berasal dari interaksi sosial antar kelompok atau dapat berkembang sebagai hasil dari proses yang terjadi dalam diri individu, seperti dinamika kepribadian. Perspektif yang serupa juga dijelaskan oleh Myers (2010), yang mengkategorikan sumber-sumber prasangka menjadi tiga jenis utama. Pertama, ada sumber sosial yang terkait dengan identitas sosial dan tekanan untuk sesuai dengan norma sosial kelompok. Kedua, terdapat sumber emosi yang mencakup perasaan frustrasi, kecenderungan untuk bersikap agresif, dan adanya ciri kepribadian otoriter. Ketiga, ada sumber kognitif yang membentuk prasangka, seperti adanya stereotip.

Berdasarkan teori yang diajukan oleh Lepore dan Brown (sebagaimana disitir dalam Juditha, 2015), stereotip dan prasangka memiliki hubungan yang erat. Prasangka dapat memicu aktivasi stereotip, dan sebaliknya, stereotip dapat memperkuat prasangka. Penting untuk dicatat bahwa stereotip tidak hanya berlaku bagi masyarakat pendatang, tetapi juga bagi masyarakat pribumi seperti etnis Jawa. Masyarakat Jawa sendiri memiliki stereotip khas yang menggambarkan mereka sebagai sopan, jujur, tradisional, dan rajin. Hasil penelitian Wodkte (2012) membuktikan bahwa peran pendidikan dalam mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk menolak stereotip yang mengarah pada suatu kelompok bergantung pada kondisi lingkungan tertentu. Harmaini (2019) menjelaskan bahwa orang tua dan keluarga berperan penting dalam menyampaikan nilai-nilai yang berkaitan dengan outgroup sehingga hal tersebut ikut andil dalam mempengaruhi prasangka individu di luar lingkungan akademik.

C. Aspek-Aspek Prasangka

Mastumoto (dalam Murdianto, 2018) menjelaskan bahwa prasangka (*prejudice*) memiliki dua komponen yaitu komponen kognitif (*thinking*), dan komponen afektif (*feeling*). Stereotip merupakan sebuah basis dari komponen kognitif dari prasangka atau *the stereotypical beliefs*, yaitu anggapan dan sikap yang dimiliki seseorang terhadap orang lainnya. Sementara komponen afektif mencakup satu perasaan seseorang kepada orang dari kelompok lain. Perasaan itu diantaranya marah, jijik, dendam, meremehkan atau sebaliknya kasihan, simpatik dan dekat. Dua komponen ini yang satu sama lain membangun prasangka. Liliweri (dalam Marista, 2014) dengan menguraikan beberapa pendapat tokoh, maka diperoleh gambaran bahwa prasangka terdiri dari tiga bentuk yang merupakan aspek dari prasangka, yaitu:

1) Stereotip

Stereotip merupakan salah satu bentuk prasangka di mana individu cenderung mengkategorikan orang lain berdasarkan berbagai karakteristik seperti kategori sosial, ras, jenis kelamin, kebangsaan, dan komunikasi verbal serta nonverbal. Stereotip dapat dilihat sebagai salah satu bentuk prasangka yang utama, yang menghasilkan perbedaan antara kategori "kami" dan "mereka". Dalam konteks ini, kelompok "kami" sering kali dianggap lebih superior daripada kelompok "mereka", yang sering kali dianggap sebagai kelompok "*outgroup*". Proses kategori sosial yang terlibat dalam pembentukan

kelompok "kami" dan "mereka", atau ingroup dan outgroup, seringkali berdampak pada perilaku individu. Individu cenderung memberikan perlakuan yang lebih baik kepada anggota kelompok "kami" atau *ingroup*, sementara cenderung mengevaluasi orang lain berdasarkan pandangan kelompok mereka sendiri.

2) Jarak Social

Seringkali, interaksi antara individu dipengaruhi oleh aspek psikologis, di mana perasaan emosi memainkan peran penting. Menurut Deaux (seperti yang dikutip dalam Marista, 2014), jarak sosial adalah salah satu aspek prasangka yang mencerminkan tingkat penerimaan seseorang terhadap individu lain dalam konteks hubungan mereka. Dalam pandangan Doob (seperti yang dikutip dalam Marista, 2014), jarak sosial adalah perasaan yang mengarah pada pemisahan individu atau kelompok tertentu berdasarkan tingkat penerimaan yang berbeda.

3) Diskriminasi

Diskriminasi merupakan variasi atau beragam kategori ancaman yang tidak seimbang terhadap orang lain. Doob (dalam Marista, 2014) lebih jauh mengakui, diskriminasi merupakan perilaku yang ditujukan untuk mencegah suatu kelompok, atau membatasi kelompok lain yang berusaha memiliki atau mendapatkan sumber daya. Prasangka dipandang sebagai ideologi atau keyakinan, dan diskriminasi adalah terapan ideologi tersebut.

D. Diskriminasi Etnis Tionghoa.

Terdapat beberapa contoh bentuk diskriminasi yang terjadi pada etnis Tionghoa di Indonesia pada beberapa aspek bidang (Irawan, 2006) :

1. Bidang Kewarganegaraan dan Ekonomi.

Diskriminasi kepada etnis Tionghoa yang sempat marak pada masa orde baru ternyata adalah warisan dari tindakan diskriminasi yang dilakukan Belanda kepada etnis Tionghoa. Namun hal ini belum redup hingga pada masa Orde Lama, pada November 1959, Presiden Soekarno tiba-tiba menandatangani Peraturan Pemerintah No.10. Peraturan ini berisi larangan bagi orang-orang asing (terutama ditujukan kepada etnis Tionghoa) untuk berdagang eceran di daerah pedalaman, yaitu di luar ibukota. Karena kebijakan itu, puluhan ribu orang beretnis Tionghoa terpaksa harus meninggalkan tempat usaha dan kediamannya di daerah pedalaman.

Larangan Penerbitan dan Pencetakan Tulisan/Iklan beraksara dan berbahasa Tionghoa. "Karena politik orde baru adalah politik asimilasi, berusaha menghapus atau menghilangkan identitas etnis Tionghoa. Di antaranya adalah: sekolah Tionghoa dihapuskan dan keharusan untuk mengganti nama, untuk menghapus identitas. Hal yang demikian sangat bertentangan dengan hak asasi manusia." ujar wakil ketua INTI Jatim, Gatot Seger Santoso menjelaskan alasan dikeluarkannya surat edaran tersebut. Padahal

penggunaan bahasa Tionghoa justru bermanfaat, karena bahasa Tionghoa termasuk salah satu dari bahasa-bahasa yang penting di dunia.

2. Bidang Budaya

Walaupun peraturan yang dikeluarkan pada saat orde baru tentang pelarangan budaya Tionghua sudah dihapus namun, dimasyarakat masih saja banyak mendeskreditkan budaya mereka atau cenderung mencurigainya (Juditha, 2015).

3. Bidang Agama

Pada masa orde baru, peniadaan ajaran konghucu disekolah-sekolah memperjelas diskriminasi terhadap penganut konghucu yang mengakibatkan etnis Tionghoa tidak memperoleh persamaan hak sipil. Tak hanya itu saja, penganut agama konghucu pada zaman itu juga kesulitan dalam mencatatkan perkawinan di catatan sipil. Hal ini menyebabkan banyak umat Konghucu yang beralih agama.

E. Cara mengatasi prasangka dan Diskriminasi

Perlunya pemahaman masyarakat akan kesadaran hidup multikulturalisme yang merupakan tanggung jawab semua pihak. Semboyan “Berbeda-beda tetapi tetap satu” harus benar-benar ditanamkan pada nilai dan norma setiap masyarakat apapun itu etnisnya. Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat guna menciptakan kehidupan yang harmoni (Juditha, 2015). pemerintah dalam hal ini juga sangat berpengaruh terhadap terciptanya integrasi bangsa Indonesia. Pada masa orde baru, kebijakan-kebijakan yang diskriminatif membuat adanya kecemburuan sosial yang terjadi di masyarakat. Kebijakan ini juga membuat etnis Tionghoa seperti tercekik dan terpasung pada ruang lingkup yang dibatasi. Namun pada acara imlek tahun 2005 silam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat melepaskan etnis Tionghoa dalam batasan tersebut dengan membebaskan umat Konghucu untuk memeluk dan menganut ajaran konfusianisme dan tidak memperkenankan pemerintah berhak ikut campur dalam hal tersebut (Irawan, 2006).

Lalu cara lainnya adalah dengan melakukan internalisasi nilai ajaran Gus Dur. Sebagai salah satu tokoh Islam yang besar di Indonesia, dan juga sosok pemimpin pemerintahan Gus Dur memberikan kebebasan atau keleluasaan pada etnis Tionghoa yang pada masa pemerintahan Soeharto banyak mendapatkan diskriminasi. Internalisasi nilai yang diajarkan oleh Gus Dur, salah satunya adalah dengan memahami secara sosio-historis bahwa etnis Tionghoa turut berperan dalam kebudayaan serta penyebaran Islam di Nusantara. Kebijakan Gus Dur terhadap etnis Tionghoa ini juga menginternalisasikan ajaran Islam yang berprinsip pada al-Musawah dan al-Ikha (persamaan dan persaudaraan), al-Huriyah (kebebasan), musyawarah, al-Adalah (keadilan, keseimbangan, dan moderasi), serta Syura (Mustajab, 2015). Prinsip-prinsip tersebut tentunya mampu memfasilitasi masyarakat etnis Tionghoa yang telah lama mendapatkan diskriminasi.

Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan, terungkap bahwa prasangka terhadap etnis Tionghoa yang dilakukan oleh sebagian kelompok merupakan pandangan negatif terhadap individu atau kelompok etnis Tionghoa, yang sering kali berakar pada aspek-aspek tertentu seperti ketimpangan ekonomi, perbedaan budaya, dan perbedaan agama. Sementara itu, diskriminasi yang dialami oleh etnis Tionghoa berasal dari kebijakan pemerintah yang diterapkan di masa lalu (era Orde Baru) dan berdampak pada aspek psikologis individu tersebut. Prasangka yang terjadi terhadap etnis Tionghoa umumnya dapat dijelaskan oleh tiga faktor utama, yaitu ketimpangan sosial ekonomi yang belum merata, pengalaman buruk di masa lalu yang berdampak pada emosi dan pemikiran individu, serta pengaruh diskriminasi yang telah dialami. Selain itu, diskriminasi terhadap etnis Tionghoa saat ini sering kali masih terkait dengan pengalaman masa lalu dan muncul kembali dalam situasi tertentu, seperti selama pemilihan umum atau Pilkada. Untuk mengatasi permasalahan ini, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesadaran hidup multikulturalisme. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama semua pihak dan perlu didukung oleh kebijakan pemerintah yang menjamin hak-hak semua warganya.

REFERENSI

- Ali, R., Indrawati, E. S., & Masykur, A. M. (2010). Hubungan Antara Identitas Etnik dengan Prasangka terhadap Etnik Tolaki pada Mahasiswa Muna di Universitas Huluoleo Kendari Sulawesi Tenggara. *Jurnal Psikologi Undip*, 7(1), 18–26.
- Antara, M., & Yogantari, M. V. (2018). Keragaman Budaya Indonesia Sumber Inspirasi Inovasi Industri Kreatif. *SENADA (Seminar Nasional Desain Dan Arsitektur)*, 292–301.
- Arifin, B. S. (2015). *Psikologi Sosial* (B. A. Saebani (ed.); 1st ed.). CV PUSTAKA SETIA.
- Burhan, O. K., & Sani, J. (2013). Prasangka terhadap Etnis Tionghoa di Kota Medan : Peran Identitas Nasional dan Persepsi Ancaman. *Psikologia : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 8(1), 25–33.
- Chaplin, J. P. (2014). *Kamus Lengkap Psikologi* (K. Kartono (ed.); 7th ed.). Rajawali Pers.
- Fulthoni, Ariningtyas, R., Aminah, S., & Sihombing, U. P. (2009). *Memahami Diskriminasi : Buku Saku Untuk Kebebasan Diskriminasi* (M. Yasin (ed.)). The Indonesia Legal Resource Center (ILRC).
- Hanggara, A. (2018). Nasionalisme Etnis Tionghoa di Indonesia. *Equilibrium*, 14(2), 56–71.
- Hanurawan, F. (2010). *Psikologi Sosial suatu Pengantar*. PT. Remaja Rosdakarya.

- Harmaini, S. M. (2019). Prasangka Etnik Melayu terhadap Etnik Minangkabau. *Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa, Dan Budaya*, 4(1), 20–31.
- Hendro, E. P. (2013). Multikulturalisme sebagai Model Integrasi Etnis Tionghoa di Indonesia. *Jurnal Kajian Kebudayaan*, 8(1), 34–42.
- Ibrahim, I. (2013). Tionghoa Indonesia : dari Dikotomi ke Mono-Identitas? *Society*, 1(1), 46–55.
- Irawan, J. (2006). *Diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa dan Pembentukan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI)*. Universitas Kristen Petra.
- Juditha, C. (2015). Stereotip dan Prasangka dalam Konflik Etnis Tionghoa dan Bugis Makassar. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 12(1), 87–104.
- Kuncoro, J. (2021). Prasangka dan Diskriminasi. *Proyeksi : Jurnal Psikologi*, 2(2), 1–6.
- Lange, P. A. M. Van, Kruglanski, A. W., & Higgins, E. T. (2012). Theories of Social Psychology. In *Psikodimensia* (Vol. 1, Issue 1).
- Marista, Y. (2014). Perbedaan Prasangka Siswa Jawa terhadap Etnis Cina antara Siswa SMA Negeri 2 Ungaran dengan Siswa SMA Don Bosko Semarang. *Jurnal Empati*, 3(2), 371–281.
- Murdianto, M. (2018). Stereotip Prasangka dan Resistensinya (Studi Kasus pada Etnis Madura dan Tionghoa di Indonesia). *QALAMUNA : Jurnal Pendidikan Sosial, Dan Agama*, 10(2), 137–160.
- Mustajab, A. (2015). Kebijakan Politik Gus Dur terhadap China Tionghoa di Indonesia. *In Right : Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 5(1), 153–192.
- Nisa, J. (2021). *Stereotip dan Prasangka dalam Komunikasi Antarbudaya Muslim Pribumi dan Etnis Cina* (I. Silviani (ed.); 1st ed.). Scopindo Media Pustaka.
- Ridwan, R. (2015). Problematika Keragaman Kebudayaan dan Alternatif Pemecahan. *Madaniyah*, 5(2), 254–270.
- Sihabudin, A., & Amiruddin, S. (2008). Prasangka Sosial dan Efektivitas Komunikasi Antarkelompok. *MEDIATOR*, 9(1), 201–220.
- Taum, Y. Y. (2006). *Masalah-Masalah Sosial dalam Masyarakat Multietnik* (pp. 1–8).
- Wodkte, G. T. (2012). The Impact of Education on Intergroup Attitudes : A Multiracial Analysis. *Social Psychology Quarterly*, 75(1), 80–106.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.